

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/85ag4z49>

INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT PALEMBANG

Frita Septavia ¹, Lies Nur Intan ², Bastiar Tambuh ³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang ¹⁻³

email korespondensi: junitarita@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat efektivitasnya. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya inventarisasi aset negara yang tertib, akurat, dan terintegrasi untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan aset sekaligus mendukung kesiapan operasional organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pengelola BMN, staf administrasi logistik, dan personel terkait; observasi proses inventarisasi; serta studi dokumentasi administrasi aset. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi BMN telah dilaksanakan melalui pencatatan administrasi berbasis aplikasi dan mendukung ketertiban data aset. Kompetensi pengelola serta pengawasan internal menjadi faktor utama pendukung, sedangkan integrasi sistem informasi dan penguatan kapasitas digital masih menjadi kendala. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan interoperabilitas sistem dan peningkatan kompetensi aparatur diperlukan untuk meningkatkan akurasi data, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan BMN.

Kata Kunci: Inventarisasi Barang Milik Negara; Manajemen Aset Publik; Sistem Informasi; Pengawasan Internal; TNI Angkatan Laut

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian penting dalam tata kelola keuangan negara yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pemanfaatan aset negara. Barang Milik Negara memiliki nilai strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk dalam sektor pertahanan negara. Dalam organisasi militer, pengelolaan BMN tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan operasional dan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan. Oleh karena itu, inventarisasi BMN menjadi proses penting dalam memastikan ketertiban administrasi, pengamanan aset, serta optimalisasi pemanfaatan barang negara (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang sebagai salah satu satuan kerja TNI Angkatan Laut memiliki berbagai jenis BMN yang mendukung operasional pertahanan, logistik, serta pelayanan administrasi organisasi. Kompleksitas jenis dan jumlah BMN menuntut sistem inventarisasi yang tertib, akurat, dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan aset negara berbasis teknologi informasi. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan inventaris BMN masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan pemahaman administrasi aset, serta keterbatasan integrasi sistem informasi (Sari & Nugroho, 2022).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengelolaan BMN pada instansi pemerintah, kajian yang secara khusus menyoroti inventarisasi BMN dalam organisasi militer tingkat pangkalan masih relatif terbatas. Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang memiliki karakteristik pengelolaan aset yang kompleks karena menggabungkan fungsi operasional pertahanan dan administrasi organisasi. Kondisi tersebut memerlukan sistem inventarisasi BMN yang efektif untuk mendukung kesiapan operasional organisasi.

Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta efektivitas sistem inventarisasi dalam mendukung pengelolaan aset negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi BMN, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan inventarisasi, serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset negara di lingkungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan manajemen aset sektor pertahanan serta menjadi dasar rekomendasi peningkatan sistem pengelolaan BMN.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam proses inventarisasi aset, mekanisme administrasi, serta kendala dalam pengelolaan BMN. Subjek penelitian meliputi pejabat pengelola BMN, staf administrasi logistik, serta personel yang terlibat dalam pengelolaan aset. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi laporan inventaris aset. Variabel penelitian mencakup sistem inventarisasi, kompetensi pengelola aset, pengawasan administrasi, serta efektivitas pengelolaan BMN.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Creswell & Creswell, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi proses inventarisasi aset, serta studi dokumentasi administrasi BMN. Validitas data diuji menggunakan triangulasi metode (Sugiyono, 2020). Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan member check (Lincoln Guba, 1985). Metode ini digunakan untuk mendukung tujuan penelitian dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan inventarisasi BMN.

3. TINJAUAN LITERATUR

Inventarisasi BMN merupakan kegiatan pencatatan, pendataan, dan pelaporan barang milik negara secara sistematis dan berkelanjutan. Inventarisasi yang efektif dapat meningkatkan akurasi data aset negara, mencegah penyalahgunaan barang, serta mendukung perencanaan kebutuhan organisasi. Dalam

perspektif manajemen aset publik, inventarisasi aset menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan aset yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan barang negara (Bastian, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan inventaris aset negara masih menghadapi berbagai permasalahan administratif dan teknis. Penelitian oleh Hidayat dan Pratama (2021) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data inventaris sering terjadi akibat lemahnya koordinasi administrasi dan kurang optimalnya sistem pelaporan aset. Penelitian lain oleh Wibowo et al. (2023) menemukan bahwa digitalisasi pengelolaan BMN mampu meningkatkan transparansi dan akurasi data aset negara, namun implementasinya masih menghadapi kendala kompetensi aparatur. Selain itu, penelitian oleh Rahman dan Putri (2022) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan aset negara sangat dipengaruhi oleh komitmen organisasi dan sistem pengawasan internal.

Kerangka konseptual penelitian disusun untuk mengarahkan analisis terhadap hubungan antarunsur utama yang telah diuraikan dalam penelitian. Secara konseptual, kerangka penelitian dirumuskan sebagai berikut: Sistem Inventarisasi BMN → Kompetensi Pengelola dan Pengawasan → Akurasi Data serta Dukungan Operasional

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang dilaksanakan melalui sistem pencatatan administrasi berbasis aplikasi pengelolaan aset negara. Berdasarkan Tabel 1, pencatatan administrasi menunjukkan tingkat optimal sebesar 70 %, sedangkan integrasi sistem informasi berada pada kategori optimal sebesar 55 %. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan inventaris BMN telah menerapkan sistem digital dalam mendukung ketertiban administrasi aset negara.

Penggunaan sistem informasi dalam inventarisasi BMN terbukti meningkatkan akurasi data aset dan mempermudah proses pelaporan serta pemantauan penggunaan barang negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wibowo et al. (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi pengelolaan aset publik mampu meningkatkan transparansi, akurasi data, serta efisiensi administrasi aset negara. Selain itu, penelitian OECD (2020) menegaskan bahwa sistem informasi aset yang terintegrasi merupakan elemen penting dalam tata kelola aset negara yang akuntabel. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam integrasi sistem informasi antarunit kerja yang berpotensi menghambat optimalisasi pengelolaan inventaris BMN secara menyeluruh

Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan inventarisasi BMN. Berdasarkan Tabel 2, pemahaman administrasi BMN berada pada kategori tinggi sebesar 65 %, sedangkan penguasaan sistem digital berada pada kategori tinggi sebesar 58 %. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelola BMN telah memiliki kemampuan administrasi yang cukup baik, meskipun masih memerlukan peningkatan kompetensi dalam penguasaan teknologi informasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Putri (2022) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap ketertiban administrasi aset negara. Penelitian World Bank (2021) juga menegaskan bahwa kompetensi aparatur dalam pengelolaan aset publik merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas tata kelola aset negara. Dalam konteks organisasi militer, kompetensi pengelola BMN tidak hanya berkaitan dengan kemampuan administratif, tetapi juga ketelitian dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan pemanfaatan aset negara. Oleh karena itu, peningkatan

pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi aparatur menjadi strategi penting dalam mendukung optimalisasi pengelolaan BMN.

Pengawasan dan pengendalian BMN dilaksanakan melalui audit administrasi aset serta monitoring pemanfaatan barang negara. Berdasarkan Tabel 3, audit administrasi menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 68%. Pengawasan internal berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat dan Pratama (2021) yang menyatakan bahwa audit administrasi aset mampu mencegah penyalahgunaan barang negara dan meningkatkan ketertiban administrasi aset. Selain itu, penelitian IFAC (2021) menegaskan bahwa pengawasan internal merupakan bagian integral dari sistem pengendalian aset publik yang bertujuan memastikan pemanfaatan aset negara secara efektif dan efisien. Namun, pengawasan pemanfaatan barang masih memerlukan penguatan sistem monitoring berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian aset negara.

Inventarisasi BMN memiliki kontribusi penting dalam mendukung perencanaan kebutuhan logistik organisasi militer. Berdasarkan Tabel 4, akurasi data aset menunjukkan kategori sangat efektif sebesar 62 %, sedangkan dukungan terhadap operasional organisasi berada pada kategori sangat efektif sebesar 66 %. Temuan ini menunjukkan bahwa inventarisasi BMN telah berperan dalam mendukung kesiapan operasional organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyawan (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan inventaris aset negara yang tertib mampu meningkatkan efektivitas perencanaan logistik organisasi. Penelitian UNDP (2022) juga menegaskan bahwa sistem inventarisasi aset yang akurat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan organisasi dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya negara. Dalam organisasi militer, inventarisasi BMN yang tertib berperan dalam menjamin kesiapan operasional dan mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem inventarisasi BMN di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang telah berjalan cukup baik melalui penggunaan sistem administrasi berbasis digital. Kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan internal organisasi menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan pelaksanaan inventarisasi BMN. Namun, keterbatasan integrasi sistem informasi dan kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur masih menjadi tantangan dalam pengelolaan aset negara. Inventarisasi BMN yang tertib terbukti mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan aset negara dalam mendukung kesiapan operasional organisasi militer.

5. KESIMPULAN

Inventarisasi Barang Milik Negara di Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang telah dilaksanakan secara sistematis dan mendukung pengelolaan aset negara secara akuntabel. Efektivitas inventarisasi dipengaruhi oleh sistem administrasi berbasis teknologi, kompetensi pengelola aset, serta pengawasan internal organisasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan integrasi sistem informasi menjadi faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan pengelolaan Barang Milik Negara nasional. Jakarta: BPK RI.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). Reformasi pengelolaan aset negara. Jakarta: BAPPENAS.
3. Bastian, I. (2020). Manajemen sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.
4. Creswell, J. W., Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
5. Halim, A. (2022). Public financial management. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
6. Hidayat, R., Pratama, D. (2021). Asset administration in public sector. *Journal of Public Administration*, 18(2), 115–128.
7. International Federation of Accountants. (2021). Public sector asset management framework. New York, NY: IFAC.
8. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Pedoman pengelolaan Barang Milik Negara. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
9. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2022). Penguatan tata kelola aset negara. Jakarta: LAN RI.
10. Lincoln, Y. S., Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
11. Mahmudi. (2020). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
12. Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Yogyakarta: ANDI.
13. Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
14. Ministry of Defence Indonesia. (2023). Asset management in defense institutions. Jakarta: Ministry of Defence Republic of Indonesia.
15. Nasution, A. (2021). Public financial accountability. Jakarta: Prenadamedia Group.
16. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Public asset management governance. Paris: OECD Publishing.
17. Prasojo, E. (2021). Governance reform and public accountability. Jakarta: Rajawali Press.

18. Rahman, T., Putri, D. (2022). Asset management effectiveness. *Public Administration Review*, 82(3), 389–401.
19. Sari, N., Nugroho, R. (2022). Public asset management digitalization. *Journal of Governance Studies*, 10(1), 45–60.
20. Setyawan, B. (2024). *Strategic asset governance*. Jakarta: Prenadamedia Group.
21. Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
22. Sutaryo, D. (2023). *Public sector financial control*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
23. Tjokroamidjojo, B. (2020). *Public administration management*. Jakarta: Haji Masagung.
24. United Nations Development Programme. (2022). *Asset management in public institutions*. New York, NY: UNDP.
25. Wibowo, H., Pramudya, A., Santoso, B. (2023). Digital transformation in public asset management. *Journal of Public Sector Innovation*, 12(1), 25–40.
26. World Bank. (2021). *Public financial management and asset governance*. Washington, DC: World Bank.